

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, riset Fendi Widiatmoko dan timnya mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam merancang RPJM Desa. Mereka menggunakan konsep partisipasi Eko (2004) sebagai dasar teoritis dengan metode kualitatif. Data utama diperoleh dari wawancara dengan 7 responden termasuk Ketua BPD, Sekdes, Kepdes, PKK, Anggota Karang Taruna, dan warga lainnya. Temuan menunjukkan masyarakat aktif dalam memberikan kebutuhan dan aspirasi mereka melalui musyawarah, serta terlibat secara menyeluruh dalam proses keikutsertaan. Kontrol terhadap masyarakat dan pemerintah juga terbagi dengan baik, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Kedua, artikel oleh Rahma Fitriayu Sari dan Alia Fajarwati (2016) menjelaskan bahwa penyusunan RPJMDes di Desa Pandowoharjo, Sleman, melibatkan aktif partisipasi masyarakat. Desa ini telah mencapai perkembangan yang sukses, yang didukung oleh partisipasi publik dalam perencanaan, termasuk penyusunan RPJMDes. Riset tersebut ditujukan guna mengidentifikasi level partisipasi masyarakat, menganalisis berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada partisipasi, dan memberikan proposal program dari komunitas untuk direncanakan dalam pengembangan Pandowoharjo. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan purposive sampling, meliputi wawancara mendalam, studi literatur, dan survei lapangan. Hasilnya menunjukkan variasi dalam partisipasi publik dalam RPJMDes 2015-2020 di Pandowoharjo, dipengaruhi oleh faktor seperti dukungan pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat, dan kapasitas yang beragam. Namun, ada kendala dalam praktiknya, terutama terkait dengan keterbatasan pemerintah dalam menyerap usulan masyarakat ke dalam RPJMDes.

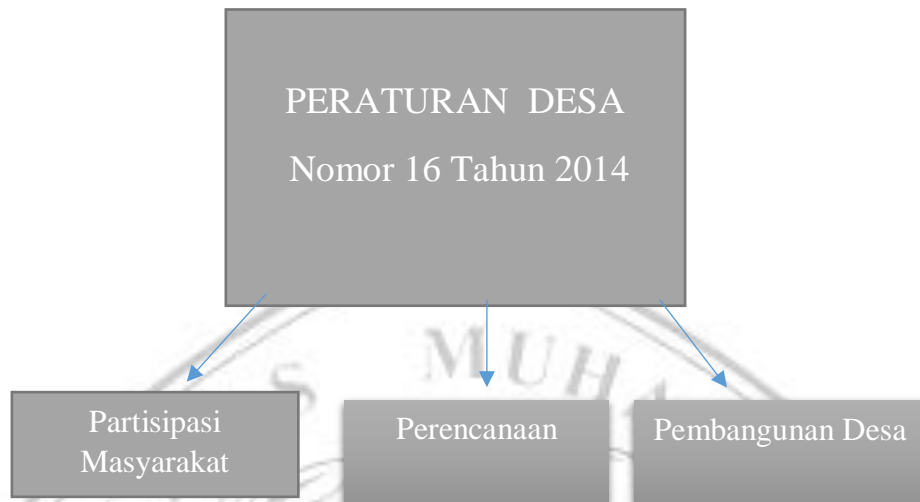
Ketiga, studi yang dilakukan oleh Claudia Indriani dan rekan-rekannya membahas level partisipasi warga pada perencanaan pembangunan khususnya di Desa Pali, Kec. Bittuang, Kab. Tanah Toraja. Partisipasi diukur menggunakan konsep Placation, di mana saran, pendapat, serta kritik warga diterima dalam proses perencanaan, akan tetapi keberjalannya tetap bersesuaian pada

keputusan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dalam hal ini tidak menghalangi partisipasi warga pada perencanaan pembangunan, mereka menghadapi keterbatasan dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan kebutuhan mereka dengan bebas.

Keempat, studi oleh Mohd Rizki Maulana dan Muhammad Abrar (2022) menginvestigasi tingkat partisipasi warga di Desa Bayeun dalam berbagai tahap perencanaan maupun evaluasi RKP Desa. Penelitian dijalankan di Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat, Kab. Aceh Timur. Metode yang dipakai yakni kombinasi deskriptif kuantitatif dengan analisis crosstab dan pendekatan kualitatif. Temuan riset menjelaskan partisipasi warga pada penyusunan RKP Desa memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, dengan nilai 17.083 dan signifikansi 0,030. Hal ini menunjukkan kontribusi yang penting dari masyarakat dalam proses perencanaan RKP Desa. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan RKP Desa, partisipasi masyarakat juga signifikan, dengan nilai masing-masing 15.972 dan 4.167, serta signifikansi berturut-turut sebesar 0,013 dan 0,002. Hasil pengujian terakhir pada tahap evaluasi menunjukkan nilai 7.778 dengan signifikansi 0,005, yang menunjukkan partisipasi yang penting dari masyarakat dalam evaluasi RKP Desa.

Kelima, studi oleh Fatmawati dan timnya di Kec. Pattallassang, Kab. Gowa, bertujuan menganalisis partisipasi warga pada pembangunan Desa Mandiri. Mereka menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dari dokumentasi, observasi, maupun wawancara, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan teoritis. Hasilnya menunjukkan partisipasi warga pada membangun desa mandiri di Kec. Pattallassang masih rendah, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan program, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kegiatan ekonomi.

2.2 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber : Diolah oleh Peneliti

2.2.1 Partisipasi

UU No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam menyuarakan kepentingan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya menjadi kunci pada pembangunan namun termasuk ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ditinjau dari etimologis, "partisipasi" didapat dari bahasa Inggris "participation" yakni mengambil bagiannya ataupun turut serta. Pada KBBI, partisipasi yakni turut serta pada aktivitas maupun peran serta aktif. Partisipasi warga pada pembangunan merujuk pada keterlibatan seluruh anggota masyarakat ataupun perwakilan mereka dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ini termasuk penentuan aktivitas yang dijalankan, manfaat yang diharapkan, serta cara menjalankan serta melakukan evaluasi terhadap hasilnya (Poerwadarminto, 2007: 243).

Partisipasi warga pada perencanaan pembangunan memiliki dampak penting dan positif, dimana dengan keterlibatan yang optimal diharapkan akan

terbangun rasa mempunyai secara kuat pada kalangan warga dengan hasil pembangunannya (Wiratno, 2016). Robert, sebagaimana yang dikutip oleh Geddesian (2005:94), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu dimulai sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Abe (2002:81) mendefinisikan perencanaan partisipatif sebagai proses perencanaan yang mengikutsertakan kepentingan masyarakat dalam tujuan dan prosesnya, baik langsung serta tidak langsung. Hakim (2020) menambahkan bahwa tujuan yang dirumuskan tanpa partisipasi warga menjadi sukar dipastikan menguntungkan rakyat.

➤ Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Adisasmitha (2001:206-207), perencanaan pembangunan dalam hal ini tidak menyertakan partisipasi warga cenderung hanya menjadi sebuah rencana di atas kertas. Dia mengemukakan bahwa partisipasi ataupun keterlibatan warganya pada pembangunan desa dapat ditinjau melalui dua aspek utama.

Pertama, partisipasi dalam perencanaan menghadirkan dua sisi yang berbeda. Secara positif, partisipasi ini memungkinkan program-program pembangunan desa direncanakan secara bersama-sama, namun secara negatif dapat menyebabkan konflik antar kelompok pada masyarakatnya yang bisa menjadi penghambat pencapaian keputusan bersama. Terdapat tantangan tambahan ketika partisipasi langsung pada perencanaan hanya bisa dilakukan secara efektif pada masyarakat kecil; sementara bagi masyarakat lebih besar, diperlukan sistem perwakilan. Akan tetapi, penting untuk memastikan bahwa perwakilannya mewakili kepentingan seluruh warga.

Kedua, partisipasi pada keberjalanan pembangunan juga memiliki dampak yang kompleks. Keuntungan dari partisipasi ini adalah sebagian besar proses perencanaan program telah selesai, seperti yang dijelaskan oleh Basri et al. (2022). Namun, kelemahannya adalah risiko mengubah warga menjadi objek pembangunan, di mana mereka hanya berperan sebagai pelaksana tanpa benar-benar memahami atau terlibat emosional dalam permasalahan yang mereka hadapi, seperti yang disoroti oleh Indarto (2017). Hal ini sering kali mengakibatkan kegagalan program yang sulit dihindari.

Maran menjelaskan terdapat beberapa macam partisipasi yakni:

1. Partisipasi dalam partai politik dapat dibagi menjadi aktif dan pasif. Partisipasi aktif meliputi menduduki posisi dalam organisasi politik, memberi dukungan finansial ataupun melakukan pembayaramiuran keanggotaannya sementara partisipasi pasif melibatkan tingkat keterlibatan yang lebih rendah.
2. Partisipasi meliputi kehadiran dalam rapat umum atau demonstrasi yang diadakan oleh organisasi politik ataupun kelompok kepentingan. Meskipun spontan, seringkali digunakan partai politik ataupun kelompok kepentingan untuk memajukan agenda politik mereka.
3. Partisipasi singkat mencakup diskusi informal yang terjadi di lingkungan seperti tempat kerja, keluarga, ataupun tempat yang lain.
4. Partisipasi dimana tidak memerlukan upaya yang besar yakni ketika seseorang turut serta dalam pemungutan suara atau memberikan suara dalam suatu kegiatan pemilihan.

Chochelas mengelompokkan partisipasi menjadi dua jenis utama: partisipasi teknis maupun partisipasi politik. Partisipasi teknis melibatkan metode untuk mengajak warga menetapkan permasalahan, melakukan pengumpulan serta analisis data, serta menerapkan hasil. Sementara partisipasi politik melibatkan adanya kekuasaan maupun kendali pada masyarakatnya dengan pilihan supaya bertindak secara mandiri maupun reflektif, termasuk dalam memperkuat institusi yang ada (Syamsudin, 2019). Pada intinya, tujuan dari partisipasi adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal agar aktif dalam semua tahapan pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan untuk menikmati langsung hasil pembangunan tersebut (Hattu et al., 2023).

Partisipasi masyarakat adalah usaha untuk menyertakannya dengan aktif pada upaya mengambil keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dengan mengacu pada definisi ini, perencanaan dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian keputusan yang mengatur aktivitas guna mewujudkan tujuan melalui sumber dayanya. Menurut Siagian (2002:36), fungsi perencanaan mencakup pengambilan keputusan saat ini yang mempengaruhi langkah-langkah di masa depan. Handoko (2003:23) menambahkan bahwa perencanaan juga meliputi penetapan tujuan

organisasi, strategi, program, proyek, standar, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.

Partisipasi masyarakat dapat berwujud beragam bentuk, misalnya adanya masukan, tanggapan, sumbangan waktu, tenaga, ataupun yang lain, serta ikut serta pada proses pengambilan keputusannya maupun perencanaan program pembangunannya (Czapanskiy & Manjoo, 2008). Tujuannya dari partisipasi ini yakni guna peningkatan mutu serta efektivitas kebijakan publik dan pembangunan, dengan begitu akan responsif terhadap kebutuhan maupun ekspektasi warganya. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya negara yang demokratis serta kesejahteraan merata untuk semua warganya (Ismanudin, 2021).

2.2.2 Perencanaan

Tjokroamidjojo menggambarkan perencanaan sebagai proses sistematis untuk menyusun kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Proses tersusun atas dua dimensi utama, yakni formulasi perencanaan dan pelaksanaannya, yang memungkinkan kontrol dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan dengan rencana sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tugas (Listyansih, 2014:90). Definisi perencanaan juga mencerminkan hubungan antara kondisi saat ini dan harapan masa depan dalam menetapkan tujuan, memprioritaskan program, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia (Uno, 2006:1).

Perencanaan adalah proses yang melibatkan pengambilan keputusan untuk mengatur aktivitas guna mewujudkan tujuan melalui sumber dayanya yang ada. Siagian (2002:36) menjelaskan fungsi perencanaan meliputi tahapan pengambilan keputusan saat ini yang akan mempengaruhi langkah-langkah di masa mendatang. Handoko (2003:23) menambahkan bahwa fungsi perencanaan juga mencakup penetapan tujuan organisasi, strategi, program, proyek, standar, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.

David (2011) menerangkan perencanaan sebagai upaya individu dalam penentuan cara yang efektif guna mewujudkan tujuan yang dikehendaki, serta menyiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin timbul melalui sumber daya secara memadai. Newman (1937) seperti yang dikutip dalam Manullang (2005)

mendefinisikan perencanaan sebagai "keputusan di awal tentang apa yang akan dilakukan". Allen (1982) menyatakan bahwa perencanaan adalah "penentuan langkah-langkah tindakan untuk mencapai suatu hasil".

➤ Jenis Perencanaan

Mengacu luasnya cakupan permasalahan yang ditemui manajer serta berjangka waktu yang tercakup pada rencana dibagi menjadi tiga bentuk yakni:

a. Rencana Global (*Global Plan*)

Hal ini mencakup penetapan tujuan menyeluruh sebuah organisasi, yang merupakan tujuan akhir jangka panjang. Tujuannya bisa dianggap dengan misi organisasi yang mengintegrasikan situasi, kondisi, dan perkembangan di masa depan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasinya. Analisis penyusunan rencana global mencakup empat aspek utama: kekuatan (*Strength*) organisasi, kelemahan (*Weaknesses*) organisasi, kesempatan (*Opportunity*) yang terbuka, serta ancaman (*Threat*) atau hambatan organisasinya.

b. Rencana Strategik

Upaya perencanaan yang berjangka panjang merupakan langkah sistematis guna mencapai tujuan yang telah disepakati oleh sebuah organisasi. Perencanaan strategik digunakan karena beberapa alasan utama. Pertama, perencanaan ini memberi kerangka dasar yang penting untuk semua jenis perencanaannya yang lain dimana akan dilakukan di dalam organisasi. Kedua, perencanaan strategik memudahkan pemahaman tentang berbagai bentuk perencanaan yang diperlukan dalam mencapai visi jangka panjang. Ketiga, perencanaan strategik menjadi titik awal yang penting dalam memahami serta mengevaluasi aktivitas dan kinerja manajerial organisasi secara menyeluruh. Rencana operasional, di sisi lain, difokuskan pada pelaksanaan strategi dan taktik jangka pendek yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis organisasi dalam jangka waktu singkat, seringkali satu tahun atau kurang.

➤ Fungsi Perencanaan

Allen (1982) menjelaskan aktivitas dari fungsi perencanaan yakni :

- a. Forecasting adalah proses memproyeksikan pekerjaan yang hendak dijalankan di masa depan oleh manajer. Aktivitas ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tergantung pada konteks kerja di mana manajer tersebut berada
- b. Establishing objectives adalah menetapkan tujuan akhirnya yang hendak diwujudkan dari rencana secara keseluruhan, termasuk tujuan untuk setiap pekerjaan dan tujuan global organisasi.
- c. Programming adalah pembuatan program yang tersusun atas rangkaian aktivitas guna pencapaian tujuan mengacu pada prioritas pelaksanaannya yang sudah ditetapkan.
- d. Scheduling adalah proses menyusun jadwal pekerjaan supaya bisa terselesaikan tepat waktu sesuai rencana.
- e. Budgeting adalah menyusun anggaran guna mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Anggaran tersebut biasanya dijelaskan berbentuk uang.
- f. Developing procedures adalah menetapkan prosedur secara tepat pada pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, serta konsistensi dalam pekerjaan yang dilakukan.
- g. Establishing and interpreting policy adalah kemampuan manajernya untuk menetapkan dan menginterpretasikan kebijakan organisasi, sehingga aktivitas dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

➤ Unsur Suatu Rencana

Perencanaan yang efektif harus mampu memberikan jawaban atas enam pertanyaan kunci yang disebut unsur perencanaan sebagaimana dijelaskan Manullang (2005). Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup: tindakan sesuatu yang perlu dijalankan, alasan mengapa tindakan itu perlu dilaksanakan, lokasi mana tindakan itu akan dijalankan, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tindakan tersebut, siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan tersebut, dan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan tindakan tersebut (Cahya, 2016).

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara komprehensif, perencanaan dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

➤ Proses Pembuatan Rencana

Menurut Manullang (2005), proses pembuatan rencana dapat diperinci sebagai berikut:

1) Melakukan penetapan tugas serta tujuan

Tugas maupun tujuan merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam formulasi rencana. Tanpa menetapkan dengan jelas apa yang harus dilakukan (tugas) dan apa yang ingin dicapai (tujuan), suatu rencana tidak dapat dibentuk secara efektif.

2) Observasi dan analisis

Proses ini melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian tujuan (observasi). Setelah faktor-faktor ini diketahui dan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menentukan faktor mana yang paling relevan dan dapat digunakan dalam perencanaan.

3) Membuat kemungkinan

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, perencanaan mencakup pembuatan berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemungkinan-kemungkinan ini dapat diurutkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti waktu yang diperlukan, biaya yang dibutuhkan, efisiensi, efektivitas, dan pertimbangan lainnya.

4) Membuat sintesis

Sintesis mengacu pada pemilihan alternatif terbaik dari berbagai kemungkinan yang telah disusun. Proses ini melibatkan penggabungan atau pengawinan dari opsi-opsi yang ada untuk menciptakan solusi terbaik dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan.

2.2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan menurut Simamora (2006:67) dan Sahroni (2004:59) mencerminkan dua perspektif yang berbeda. Simamora menjelaskan bahwa pembangunan merujuk pada proses menuju perubahan dalam masyarakat, yang

mengarah pada pengendalian yang lebih baik terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, serta pemberdayaan individu untuk mengontrol diri mereka sendiri. Sementara Sahroni memandang pembangunan sebagai proses sistemik yang terdiri dari input, proses konversi, dan output, yang saling berhubungan dengan subsistem lain dan lingkungan internasional.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberi otonomi pada desa dalam mengatur maupun mengelola rumah tangganya, termasuk dalam pemilihan kepala desa dan pembuatan Peraturan Desa. Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas SDM serta mendorong prakarsa maupun swadaya masyarakat desa. Masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun juga subjek yang aktif dalam proses pembangunan, baik di tingkat desa maupun nasional.

Pembangunan desa, sebagai bagian dari upaya nasional, melibatkan pemerintah maupun masyarakat dalam mengerahkan kemampuannya guna membangun warga pedesaan. Otonomi desa memainkan peran strategis dalam memecahkan masalah sosial-ekonomi di tingkat lokal, sambil mendukung ide pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya.